



P E N E T A P A N

Nomor : 13/Pdt.P/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor **13/Pdt.P/2013/PA.LK** pada tanggal yang sama mengemukakan dalil-dalil dengan perubahan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 1985 di Masjid, di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (Ayah kandung Pemohon II) yang berwakil secara lisan kepada P3N yang bernama **PETUGAS P3N**, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa barang, yaitu bahan kain untuk baju dibayar tunai;

hal. 1 dari 10 hal. Perkara No. 13/Pdt.P/2013/PA.LK



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1 ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Juli 1987;
 - 5.2 ANAK II, perempuan, lahir tanggal 23 Mei 1992;
 - 5.3 ANAK III, perempuan, lahir tanggal 30 Desember 1996;
6. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di PPN/KUA. Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1985 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,.

SUBSIDER

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusrisita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 29 Januari 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi di persidangan :

1 **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara seibu Pemohon II, sedangkan Pemohon I saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 1985 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang berwakil kepada P3N bernama **PETUGAS P3N** dihadiri oleh 2

hal. 3 dari 10 hal. Perkara No. 13/Pdt.P/2013/PA.LK



orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa kain untuk baju dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa kegunaan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

2 **SAKSI II**, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Januari 1985 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada P3N bernama **PETUGAS P3N** disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa kain untuk baju dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;



- Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa kegunaan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

hal. 5 dari 10 hal. Perkara No. 13/Pdt.P/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 3 Januari 1985 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Datar, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada P3N bernama **PETUGAS P3N** disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa kain untuk baju dibayar tunai akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus akte kelahiran anak serta untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 1985 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang berwakil kepada P3N, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa kain untuk baju dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa kegunaan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak serta lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 1985 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada P3N yang bernama **PETUGAS P3N** disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa kain baju dibayar tunai ;

hal. 7 dari 10 hal. Perkara No. 13/Pdt.P/2013/PA.LK



- Bahwa kegunaan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak serta lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis, sebagai berikut:

:
:
()

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab T'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:



Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1985 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

hal. 9 dari 10 hal. Perkara No. 13/Pdt.P/2013/PA.LK



2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1985 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI,S.Pd.SH** dan **AHYAR SIDDIQ,SELMHI** Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : **13/Pdt.P/2013/PA.LK**, tanggal 20 Februari 2013, untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim anggota yang sama serta **SUMRATI,BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



SAMSUL FADLI,S.Pd.SH

Dra. Hj. DEWI WARTI

AHYAR SIDDIQ,SEL.MHI

PANITERA PENGGANTI

SUMRATI, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 241.000,-

hal. 11 dari 10 hal. Perkara No. 13/Pdt.P/2013/PA.LK